



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA
PADANG PANJANG**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD Tahun 2022, telah mengisyaratkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mendapat dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tanggal 25 Juli 2022 perihal Atensi Terkait Kebijakan APIP dan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang juga semakin menegaskan bahwa Inspektorat Kota Padang Panjang wajib mendapatkan anggaran 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Pemerintah Kota Padang Panjang maka dibentuklah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seluruh aparatur pemerintahan yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mulai dari tingkatan paling bawah sampai dengan tingkatan pimpinan disebut Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Seiring dengan perubahan konsep pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan melayani, maka disaat itu pula peran Inspektorat berubah. Paradigma Inspektorat yang masih dianggap semacam “tokoh antagonis” dalam Pemerintahan yang senantiasa mencari-cari kesalahan Perangkat Daerah/unit kerja harus segera mungkin dihilangkan. Namun perkembangan tuntutan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi maupun semakin kompleksnya permasalahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dihadapi Perangkat Daerah/unit kerja menuntut adanya perubahan peran APIP dari *watchdogs* menjadi mitra Perangkat Daerah/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Perlunya perubahan paradigma tersebut disadari secara penuh oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga melahirkan inovasi berupa klinik konsultasi. Saat ini kantor Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah mempunyai ruangan khusus yang kami sebut dengan “ruangan konsultasi” sebagai tempat bagi Perangkat Daerah/unit kerja dalam melakukan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan

APIP. Diharapkan kedepan kehadiran Inspektorat Daerah lebih dirasakan sebagai mitra kerja bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak lagi dianggap sebagai Perangkat Daerah yang suka mencari-cari kesalahan dan kekurangan Perangkat Daerah.

Selanjutnya Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang akan selalu meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas audit, yang sejalan dengan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Untuk itulah APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang perlu ditingkatkan baik kualitasnya maupun kapasitasnya setiap saat.

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas–tugas tersebut maka Inspektorat Kota Padang Panjang mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan daerah.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan daerah.
4. Penyelenggaraan urusan ke Sekretariat Inspektorat Kota dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Bidang Pengawasan.

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun 2023.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat...7	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	19
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat.....	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	43
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat.....	46
BAB V Penutup.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang....	3
Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD.....	3
Gambar 2.1	PohonMasalah Inspektorat Kota Padang Panjang.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang.....	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang Berdasarkan Renstra 2024-2026.....	11
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024	15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.....	18
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan.....	19
Tabel 2.6	Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	21
Tabel 2.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dengan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	23
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	28
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.....	31
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri.....	36
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.....	39
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Opd Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	42
Tabel 3.6	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang.....	45
Tabel 4.7	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

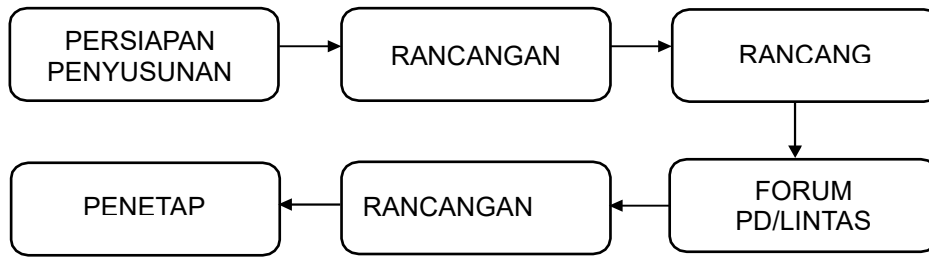
Proses penyusunan rancangan awal Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang

Panjang 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih dan Akuntabel”.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
 - k. Pembahasan forum OPD
3. Penyusunan rancangan
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bappeda Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Bappeda.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

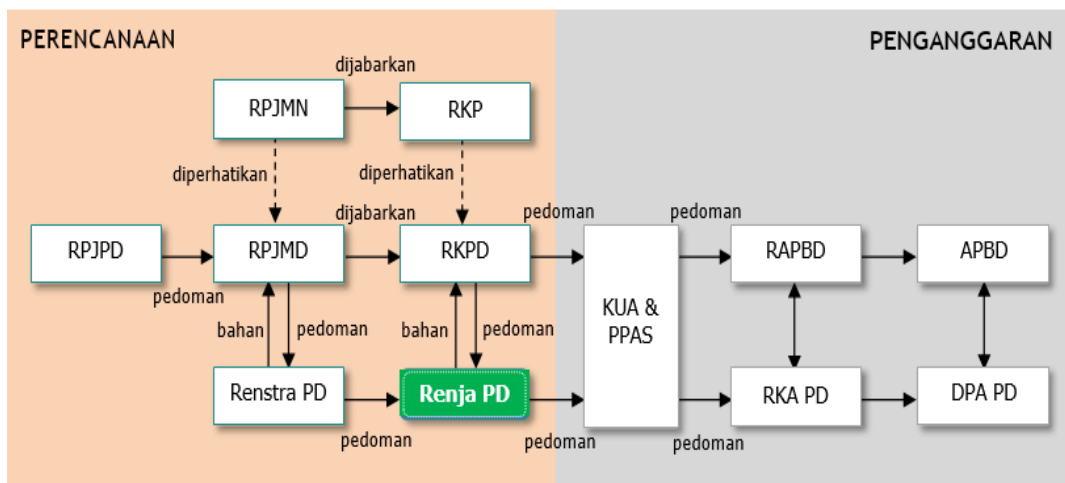
GAMBAR 1.1



Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; (sesuaikan dengan Perwako SOTK OPD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023)

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

kode	Usuran / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024		Catatan	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun	Tingkat Capaian Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=9	11	12	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01	Inspektorat Daerah										
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
6	01	01	2.02	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	95%	95%	95%	100%	100%		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selesai dibayarkan	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	100%	
6	01	01	2.05	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tuga dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	38 Orang	33 Orang	33 Orang	100%	
6	01	01	2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang selesai dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	70 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	70 Jenis	100%	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60%	1 Paket	1 Paket	100%	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	-60 kali -200 kali	75 Laporan	75 Laporan	100%	
6	01	01	2.08	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	100%	80%	100%	80%	100%		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa Surat menyurat yang selesai dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Telepon, Air dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	100%	

6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Pegawai honorer yang mendapatkan upah Jumlah Tenaga Keamanan Yang tersedia Jumlah Tenaga Kebersihan Yang tersedia Jumlah Tenaga Sopir yang tersedia -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	1 Orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 Laporan	1 Orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 Laporan	1 Orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 Laporan	1 Orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 Laporan	100%				
kode					Usuran / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024		Catatan
									Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun	Tingkat Capaian Realisasi	
6	01	01	2.09	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang selesai Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%				
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	14 Unit	9 Unit	9 Unit	100%				
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 Unit	0	16 Unit	16 Unit	100%				
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%				
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP Level Maturitas SPIP	-Level 3 -Level 3	89%	-Level 3 -Level 3	-Level 3 -Level 3	100%				
6	01	02	2.01		1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh auditan	80%	79,88%	80%	80,00%	100%				
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%				
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	164 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	100%				
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%				
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%				
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%				
6	01	02	2.02	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%				
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	79,22%	100%	100,00%	100%				
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention)	89%	91,70%	89%	91,70%	103%				
6	01	03	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	95%	89,98%	95%	89,98%	95%				
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah	- 24 OPD - 1500 Wajib Lapor - 50 %	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	100%				

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%				
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	- 1 Aksi - 100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%				

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kota Padang Panjang
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024		Catatan									
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun	Tingkat Capaian Realisasi										
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=9	11	12									
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
6	01	Inspektorat Daerah																		
6	01	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	90%				90%	100%	100%	
6	01	01	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu	100%					100%	100%	100%					
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selesai dibayarkan	1442 Orang/ Bulan					462 Orang/ Bulan	462 Orang/ Bulan	100%					
6	01	01	2.05	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100%					100%	100%	100%					
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket					40 Paket	40 Paket	100%					
6	01	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Orang					0	0	100%					
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tuga dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang					40 Orang	40 Orang	100%					
6	01	01	2.06	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengadministrasian Umum yang selesai dilaksanakan	100%					100%	100%	100%					
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis					4 Paket	4 Paket	100%					
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket					1 Paket	1 Paket	100%					
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	70 Jenis					4 Paket	4 Paket	100%					
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket					12 Paket	12 Paket	100%					
6	01	01	2.06		Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	15 Laporan					5 Laporan	5 Laporan	100%					
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan					150 Laporan	150 Laporan	100%					
6	01	01	2.07	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan	100%					100%	100%	100%					

6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit				2 Unit	2 Unit	100%	
6	01	01	2.08		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	80%				100%	100%	100%	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	100%	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	108 Laporan				36 Laporan	36 Laporan	100%	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	100%	
6	01	01	2.09		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang selesai Dilaksanakan	100%				100%	100%	100%	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit				8 Unit (2 Roda 4, 6 Roda 2)	8 Unit (2 Roda 4, 6 Roda 2)	100%	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit (Roda 4)				1 Unit Roda 4	1 Unit Roda 4	100%	
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit				5 Unit	5 Unit	100%	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit				10 Unit	10 Unit	100%	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 Unit				1 Unit	1 Unit	100%	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	95%				88%	88%	100%	
6	01	02	2.01		1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh auditan	95%				70%	70%	100%	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18 Laporan				6 Laporan	6 Laporan	100%	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	375 Laporan				120 Laporan	120 Laporan	100%	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan				2 Laporan	2 Laporan	100%	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100%	
6	01	02	2.01		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kpint Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang Dilaksanakan	4 Laporan				0 Laporan	0 Laporan	100%	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	13 Laporan				3 Laporan	3 Laporan	100%	
6	01	02	2.01		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%				100%	100%	100%	
6	01	02	2.01	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani (Laporan)	3 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100%	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	18 Laporan				6 Laporan	6 Laporan	100%	
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention)	93%				91%	91%	100%	
6	01	03			1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	75%				50%	50%	100%	
6	01	03			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	

6	01	03	2.02		2. Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	90%					87%	87%	100%	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	69 Perangkat Daerah					23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	100%	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	69 Perangkat Daerah					23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	100%	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan					2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	69 Perangkat Daerah					23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	100%	

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan 3 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 95 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kerjanya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja Level Kapabilitas APiP dan Level Maturitas SPIP dengan target kinerja tahun 2023 Level 3 dengan capaian Level 3 dengan persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 2 Kegiatan dengan 6 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Program Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP (Mpnitoring Center for Prevention) target tahun 2023 sebesar 89% dengan capaian 92% dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan
Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp))	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
						Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)
1					2	3	4	5=4/3	6	7	8
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Rp5.289.950.062	Rp5.217.509.584	98,63%	Rp7.009.327.133	Rp7.009.327.135	100%
6	01				Inspektorat Daerah	Rp5.289.950.062	Rp5.217.509.584	98,63%	Rp7.009.327.133	Rp7.009.327.135	100%
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.757.182.562	Rp4.696.242.474	98,72%	Rp5.938.410.933	Rp5.938.410.935	100%
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.207.283.212	Rp4.173.378.310	99,19%	Rp4.650.716.833	Rp4.650.716.834	100%
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.207.283.212	Rp4.173.378.310	99,19%	Rp4.650.716.833	Rp4.650.716.834	100%
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp282.143.500	Rp282.143.500	100%
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				Rp16.000.000	Rp16.000.000	100%
6	01	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				Rp263.589.800	Rp263.589.800	100%
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Rp2.553.700	Rp2.553.700	100%
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp241.490.750	Rp232.214.004	96,16%	Rp295.312.900	Rp295.312.900	100%
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.177.800	Rp1.023.000	86,86%	Rp2.553.700	Rp2.553.700	100%
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp9.094.000	Rp9.094.000	100%
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp20.696.600	Rp18.343.200	88,63%	Rp47.784.800	Rp47.784.800	100%
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp17.631.350	Rp14.125.100	80,11%	Rp13.656.400	Rp13.656.400	100%
6	01	01	2.06		Fasilitas Kunjungan Tamu						
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp201.985.000	Rp198.722.704	98,38%	Rp222.224.000	Rp222.224.000	100%
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0	Rp0		Rp91.790.500	Rp91.790.501	100%
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Rp91.790.500	Rp91.790.501	100%
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp191.523.600	Rp181.499.265	94,77%	Rp248.117.200	Rp248.117.200	100%
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.000.000	Rp1.550.000	77,50%	Rp520.000	Rp520.000	100%

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp))	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
						Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp18.450.000	Rp13.926.849	75,48%	Rp17.808.400	Rp17.808.400	100%
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp171.073.600	Rp166.022.416	97,05%	Rp229.788.800	Rp229.788.800	100%
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp116.885.000	Rp109.150.895	93,38%	Rp370.330.000	Rp370.330.000	100%
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp106.755.000	Rp99.272.795	92,99%	Rp221.750.000	Rp221.750.000	100%
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan				Rp32.020.000	Rp32.020.000	100%
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				Rp800.000	Rp800.000	100%
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp10.130.000	Rp9.878.100	97,51%	Rp16.560.000	Rp16.560.000	100%
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Rp99.200.000	Rp99.200.000	100%
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp363.225.000	Rp362.100.500	99,69%	Rp707.383.200	Rp707.383.200	100%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp306.225.000	Rp305.180.500	99,66%	Rp593.201.000	Rp593.201.000	100%
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp32.800.000	Rp32.795.000	99,98%	Rp39.600.000	Rp39.600.000	100%
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp190.200.000	Rp189.925.000	99,86%	Rp405.600.000	Rp405.600.000	100%
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Rp14.810.000	Rp14.810.000	100,00%	Rp23.800.000	Rp23.800.000	100%
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Rp17.020.000	Rp17.020.000	100,00%	Rp43.179.000	Rp43.179.000	100%
6	01	02	2.01		Kerja Sama Pengawasan Internal						
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp51.395.000	Rp50.630.500	98,51%	Rp81.022.000	Rp81.022.000	100%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp57.000.000	Rp56.920.000	99,86%	Rp114.182.200	Rp114.182.200	100%
6	01	02	2.01	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah				Rp49.982.200	Rp49.982.200	100%
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp57.000.000	Rp56.920.000	99,86%	Rp64.200.000	Rp64.200.000	100%
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp169.542.500	Rp159.166.610	93,88%	Rp363.533.000	Rp363.533.000	100%
6	01	03			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp))	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
						Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)
6	01	03			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Rp169.542.500	Rp159.166.610	93,88%	Rp363.533.000	Rp363.533.000	100%
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp29.437.000	Rp29.068.000	98,75%	Rp123.755.000	Rp123.755.000	100%
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp6.450.000	Rp6.387.000	99,02%	Rp10.700.000	Rp10.700.000	100%
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp133.655.500	Rp123.711.610	92,56%	Rp109.207.600	Rp109.207.600	100%
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				Rp119.870.400	Rp119.870.400	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 3 (empat) program, 9 (dua belas) kegiatan, dan 19 (dua puluh satu) sub kegiatan.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tidak mempunyai Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dapat dilihat dalam table 2.3

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				NIHIL									

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kualitas perencanaan pembangunan daerah”
2. Sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah denan indikator Level Maturitas SPIP. Pada tahun 2023 Level Maturitas SPIP telah sampai sesuai dengan target yaitu berada pada indeks Level 3

- b. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan indikator Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat. Pada tahun 2023 realisasi dari indikator ini mendapatkan nilai persentase 98%
- c. Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator Level Kapabilitas Apip. Realisasi dari indikator ini pada tahun 2023 mendapatkan nilai indeks Level 3 dan telah seusai dengan target yang telah direncanakan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

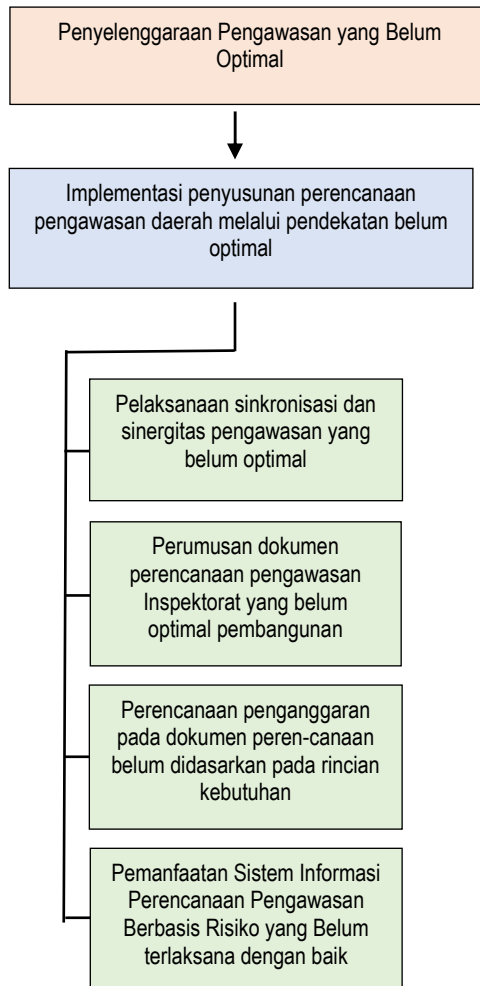
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Pengawasan pemerintah daerah disadari bahwa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Penyelenggaraan Pengawasan yang Belum Optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pengawasan daerah melalui pendekatan belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas pengawasan yang belum optimal	
			Perumusan dokumen perencanaan pengawasan Inspektorat yang belum optimal	
			Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan	
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang Belum terlaksana dengan baik	

Gambar 2.1
POHON MASALAH
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG KOTA PADANG PANJANG



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.6
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah Masih rendahnya nilai Investasi Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahidupan Masyarakat	Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	layanan infrastruktur dasar kesesuaian pemanfaatan ruang kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah dengan Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang.

2. Belum optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang.
3. Belum optimalnya Pelaksanaan dan tindak lanjut Penelitian Dan Pengembangan Daerah di Kota Padang Panjang.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.7

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

No	Rancangan Awal RKPD 2025(Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	INSPEKTORAT				5.420.702.960					6.983.354.635	1.562.651.675	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.420.702.960					6.983.354.635	1.562.651.675	
	UNSRU PENGAWASAN				5.420.702.960					6.983.354.635	1.562.651.675	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	90%	4.738.942.960	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	90%	5.967.984.435	1.229.041.475	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.150.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.650.723.135	500.723.135	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/Bulan	4.150.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	4.650.723.135	500.723.135	Rujukan Tahun 2024
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	36.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	200.000.000	164.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	Tahun 2024
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	-	-	Tahun 2024
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang Panjang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	36.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang Panjang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	200.000.000	164.000.000	Rujukan Tahun 2024
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	198.942.960	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	318.103.100	119.160.140	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.489.900	389.900	Rujukan Tahun 2024
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.053.000	(7.947.000)	Rujukan Tahun 2024
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	4 Paket	20.842.960	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	4 Paket	49.698.800	28.855.840	Rujukan Tahun 2024
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.723.400	(8.276.600)	Rujukan Tahun 2024
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5 Laporan	10.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0 Laporan	-	(10.000.000)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	246.138.000	116.138.000	Rujukan Tahun 2024
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	182.101.000	182.101.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	182.101.000	182.101.000	Kebutuhan Alat Kerja (Laptop)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	219.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	248.637.200	29.637.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.040.000	(960.000)	Rujukan Tahun 2024
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	27.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	17.808.400	(9.191.600)	Rujukan Tahun 2024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	229.788.800	39.788.800	Rujukan Tahun 2024 (Gaji THL)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik	100%	135.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik	100%	368.420.000	233.420.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit (2 Roda 4, 6 Roda 2)	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit (2 Roda 4, 6 Roda 2)	221.750.000	136.750.000	Rujukan Tahun 2024
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit Roda 4	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit Roda 4	32.020.000	2.020.000	Rujukan Tahun 2024
	Pemeliharaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	-	Tahun 2024
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	11.110.000	1.110.000	Rujukan Tahun 2024
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	103.540.000	93.540.000	Rujukan Tahun 2024
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kota Padang Panjang	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90%	475.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Kota Padang Panjang	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90,00%	643.072.000	168.072.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Padang Panjang	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditor	75%	420.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Padang Panjang	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditor	75%	556.822.000	136.822.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	60.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	37.200.000	(22.800.000)	Rujukan Tahun 2024
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan	230.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan	405.600.000	175.600.000	Rujukan Tahun 2024
	Reviu Laporan Kinerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	30.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	22.200.000	(7.800.000)	Rujukan Tahun 2024
	Reviu Laporan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	25.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	16.650.000	(8.350.000)	Rujukan Tahun 2024
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan joint Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang Dilaksanakan	2 Laporan	20.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan joint Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang Dilaksanakan	0 Laporan	-	(20.000.000)	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Laporan	55.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	75.172.000	20.172.000	Rujukan Tahun 2024
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Padang Panjang	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	100%	55.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang Panjang	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	100%	86.250.000	31.250.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani (Laporan)	1 Laporan	2.500.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani (Laporan)	1 Laporan	22.050.000	19.550.000	Rujukan Tahun 2024
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6 Laporan	52.500.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6 Laporan	64.200.000	11.700.000	Rujukan Tahun 2024

	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Padang Panjang	Persentase Capaian Aksi pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention)	92%	206.760.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Padang Panjang	Persentase Capaian Aksi pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention)	92%	372.298.200	165.538.200	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Padang Panjang	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	50%	10.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Padang Panjang	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	50%		(10.000.000)	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	10.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi		(10.000.000)	
	Pendampingan dan Asistensi	Kota Padang Panjang	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	88%	196.760.000	Pendampingan dan Asistensi	Kota Padang Panjang	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	88%	372.298.200	175.538.200	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah	50.760.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah	106.725.000	55.965.000	Rujukan Tahun 2024
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah	10.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Padang Panjang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah	19.000.000	9.000.000	Rujukan Tahun 2024
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	76.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	122.148.800	46.148.800	Rujukan Tahun 2024
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Padang Panjang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 Perangkat Daerah	60.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Padang Panjang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 Perangkat Daerah	124.424.400	64.424.400	Rujukan Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijamin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian

targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian targettarget sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian targettarget pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

3.1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi

Misi	Tujuan	Sasaran
berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	kehidupan masyarakat	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73	
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02	60,02	
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan	
			Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95	
			Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00	
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00	
6		Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44	
			LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74	
			LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43	
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)	
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan	
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70	69-70	
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18			56,18	57,00	57,50	58,00	58,0		

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 2 (dua). yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel**”, Indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator yang akan dicapai: Nilai SAKIP.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek perencanaan dan aspek penelitian dan pengembangan, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.4 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal)

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dirumuskannya Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan, serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2020-2024 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi objektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif,
dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan
Pemerintahan Dalam Negeri”

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan dan cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai motor penggerak perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke arah yang lebih baik. Disamping itu digunakan sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang disinergikan dengan penggerak lainnya dalam suatu system yang utuh. Kata kunci dari Visi Inspektorat Jenderal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memosisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri

untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwa Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri bertanggungjawab pada tujuan Kemendagri sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2020	Target 2024
1.	Peningkatan Kapasitas dan	Meningkatnya Kapasitas dan	Tingkat Kapabilitas Auditor	Level 3	Level 3

	Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Tingkat Kapasitas PPUPD Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Level 3 80 0	Level 3 100 90
2.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Pengawasan Internal Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	80 80	100 85

Salah satu indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang selaras dengan indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan target pada akhir Renstra 2024-2026 adalah Level 3.

2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun. Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026).

Visi dan Misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dirumuskan sebagai berikut:

1. Visi :

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi SKPD merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

“Menjadi Lembaga yang Profesional dan Bermartabat Untuk Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera
Barat”

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Peran dan Kualitas Pengawasan serta Mendorong
Terwujudnya Akuntabilitas Dilingkungan Pemerintah Daerah”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Tahun 2021-2026 diketahui Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Target 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	Meningkatnya Kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Level 3	Level 4 Level 4
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Nilai Akuntabilitas OPD Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Umum Tingkat Kepuasan atas Layanan Kepegawaian Tingkat Kepuasan atas Layanan Aset	A 80 80 80	A 81,5 81,5 81,5

--	--	--	--	--	--

Sesuai dengan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diatas, ada 2 indikator sasaran yang selaras dengan indikator sasaran Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yaitu:

1. Level Kapabilitas APIP dengan target Level 3 pada akhir Renstra Perubahan 2018-2023.
2. Level Maturitas SPIP dengan target Level 3 pada akhir Renstra Perubahan 2018-2023.

3. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPD Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan organisasi perangkat daerah yang mengintervensi tujuan pada RPD yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional, bersih, dan akuntabel dengan indikator tujuan indek reformasi birokrasi.

Tujuan diatas diturunkan menjadi sasaran yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi tujuan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 diturunkan menjadi tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan pengawasan pemerintah daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG Kota Padang Panjang Tahun
2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	96%	97%	98%
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Bappeda sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Inspektorat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- d) Pemeliharaan Mebel
- e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c) Reviu Laporan Kinerja
 - d) Reviu Laporan Keuangan
 - e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu., dengan sub kegiatan:
 - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri 1 kegiatan yaitu :

1. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2. Perumusan Kebijakan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		
1	2			3	4	5=4/3	6	7	8		
6	INSPEKTORAT				6.983.354.635	PAD			5.580.702.960		
6	01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.983.354.635				5.580.702.960		
		UNSRU PENGAWASAN			6.983.354.635				5.580.702.960		
6	01	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	Kota Padang Panjang	90%	5.967.984.435		90%	4.838.942.960	
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan Tepat Waktu	Kota Padang Panjang	100%	4.650.723.135		4.150.000.000	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selesai dibayarkan	Kota Padang Panjang	31 Orang/ Bulan	4.650.723.135	490 Orang/ Bulan	4.150.000.000
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	Kota Padang Panjang	100%	200.000.000		100%	46.000.000
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang	0 Paket	-	0 Paket	-
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang Panjang	0	-	1 Orang	10.000.000
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tuga dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Padang Panjang	31 Orang	200.000.000	41 Orang	36.000.000
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang selesai dilaksanakan	Kota Padang Panjang	100%	318.103.100		100%	238.942.960
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	3.489.900	4 Paket	3.100.000
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	2.053.000	1 Paket	10.000.000
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	49.698.800	4 Paket	30.842.960

6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Paket	16.723.400			12 Paket	25.000.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Kota Padang Panjang	5 Laporan	-			5 Laporan	10.000.000
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	150 Laporan	246.138.000			150 Laporan	160.000.000
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan	Kota Padang Panjang	100%	182.101.000			100%	50.000.000
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	10 Unit	182.101.000			6 Unit	50.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	Kota Padang Panjang	90%	248.637.200			80%	219.000.000
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kota Padang Panjang	12 Laporan	1.040.000			12 Laporan	2.000.000
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kota Padang Panjang	48 Laporan	17.808.400			36 Laporan	27.000.000
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	229.788.800			12 Laporan	190.000.000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang selesai Dilaksanakan	Kota Padang Panjang	100%	368.420.000			100%	135.000.000
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	8 Unit (2 Roda 4, 6 Roda 2)	221.750.000			8 Unit (2 Roda 4, 6 Roda 2)	85.000.000
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	1 Unit Roda 4	32.020.000			1 Unit Roda 4	30.000.000
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	0 Unit	-			0 Unit	-
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Padang Panjang	20 Unit	11.110.000			10 Unit	10.000.000
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	103.540.000			1 Unit	10.000.000
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	Kota Padang Panjang	90%	643.072.000			90%	485.000.000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh auditan	Kota Padang Panjang	75%	556.822.000			75%	430.000.000
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	6 Laporan	37.200.000			6 Laporan	60.000.000
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	125 Laporan	405.600.000			125 Laporan	240.000.000

6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Padang Panjang	2 Laporan	22.200.000			2 Laporan	30.000.000
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	16.650.000			1 Laporan	25.000.000
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kpint Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang Dilaksanakan	Kota Padang Panjang	0 Laporan	-			2 Laporan	20.000.000
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Padang Panjang	4 Laporan	75.172.000			5 Laporan	55.000.000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu yang tuntas dilaksanakan	Kota Padang Panjang	100%	86.250.000			100%	55.000.000
6	01	02	2.01	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani (Laporan)	Kota Padang Panjang	1 Laporan	22.050.000			1 Laporan	2.500.000
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	Kota Padang Panjang	6 Laporan	64.200.000			6 Laporan	52.500.000
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention)	Kota Padang Panjang	92%	372.298.200			93%	256.760.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	Kota Padang Panjang	50%				75%	20.000.000
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Padang Panjang	1 Rekomendasi	-			2 Rekomendasi	20.000.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	Kota Padang Panjang	88%	372.298.200			90%	236.760.000
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	Kota Padang Panjang	23 Perangkat Daerah	106.725.000			23 Perangkat Daerah	70.760.000
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Padang Panjang	23 Perangkat Daerah	19.000.000			23 Perangkat Daerah	15.000.000
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Padang Panjang	2 Kegiatan	122.148.800			2 Kegiatan	76.000.000
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Padang Panjang	23 Perangkat Daerah	124.424.400			23 Perangkat Daerah	75.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Inspektorat Daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Kota Padang Panjang
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada table 4.1 berikut :

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.983.354.635,00							6.983.354.635,00	
	6.970.191.635,00							6.957.700.635,00	
	6.970.191.635,00							6.957.700.635,00	
93 %	5.954.821.435,00						93 %	5.893.403.233,00	
100 %	4.650.723.135,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	4.650.716.833,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31 Orang/bulan	4.650.723.135,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	48 Orang/bulan	4.650.716.833,00	INSPEKTORAT DAERAH
100 %	200.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	263.589.800,00	INSPEKTORAT DAERAH

PANGKALAN 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31 Orang	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	31 Orang	263.589.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
100 %	316.050.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	100 %	286.218.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
4 Paket	3.489.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Paket	2.553.700,00	INSPEKTORAT DAERAH

Paket 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 Paket	49.698.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Paket	47.784.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
12 Paket	16.723.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	2 Paket	13.656.400,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150 Laporan	246.138.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	160 Laporan	222.224.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
100 %	182.101.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	91.790.500,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10 Unit	182.101.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4 Unit	91.790.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
90 %	248.637.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	100 %	248.117.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
12 Laporan	1.040.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Laporan	520.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARUHAN 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48 Laporan	17.808.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Laporan	17.808.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
12 Laporan	229.788.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Laporan	229.788.800,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100 %	357.310.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	352.970.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

as Jabatan

8 Unit	221.750.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	8 Unit	221.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
--------	----------------	--	------------------------------	---	---	---	--------	----------------	--------------------

ngan

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Unit	32.020.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Unit	32.020.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
1 Unit	103.540.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Unit	99.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
90 %	643.072.000,00						90 %	707.383.200,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				12	13				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75 %	556.822.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	80 %	593.201.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6 Laporan	37.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	6 Laporan	39.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120 Laporan	405.600.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	130 Laporan	405.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2 Laporan Laporan	22.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD	2 Laporan	23.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Laporan	16.650.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	1 Laporan	43.179.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
4 Dokumen	75.172.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	5 Dokumen	81.022.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100 %	86.250.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	114.182.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
1 Laporan	22.050.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Laporan	49.982.200,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				12	13				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 Laporan	64.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	6 Laporan	64.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
92 %	372.298.200,00						92 %	356.914.202,00	
88 %	372.298.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan	-	90 %	356.914.202,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23 perangkat daerah	106.725.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	23 perangkat daerah	123.755.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
23 perangkat daerah	19.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	23 perangkat daerah	10.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 Kegiatan	122.148.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	2 Kegiatan	109.207.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
23 perangkat daerah	124.424.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	23 perangkat daerah	113.251.602,00	INSPEKTORAT DAERAH
	13.163.000,00							25.654.000,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				12	13		14	15	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93 %	13.163.000,00						93 %	25.654.000,00	
100 %	2.053.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	9.094.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

					<p>araan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif</p>				
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100 %	11.110.000,00			-	<p>Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif</p>	-	100 %	16.560.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

				araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				
	6.983.354.635,00						6.983.354.635,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juli 2024

INSPEKTUR

Dr. SYHRIL, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda/Nip. 197004051997031004